

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan ke empat di dunia, berdasarkan sumber informasi dari statistika nasional (*Statistical Yearbook Of Indonesia*) tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka 258.704.900 jiwa pada tahun 2016 (BPS, 2017). Kepadatan ini memicu hadirnya permasalahan sosial yaitu kemiskinan yang membuat masyarakat hidup tidak sejahtera. Kondisi tersebut menarik simpati publik khususnya masyarakat sipil (*civil society*) seperti lembaga filantropi Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), lembaga keagamaan, masjid, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas masyarakat sipil lainnya untuk mengadakan penggalangan dana (*fundraising*) dalam membantu persoalan kemanusiaan khususnya dalam hal logistik.

Faktor kemiskinan selalu berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Dalam *Economics Development Analysis Journal* tahun 2013 yang ditulis oleh Siti Romidah Harahap menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1997-1998 mengalami krisis moneter yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tukar rupiah (inflasi). Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor ketidakstabilan pemerintah dalam pengambilan kebijakan (*policy*) dimana berimplikasi melahirkan krisis politik ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Dampak tersebut mengganggu kestabilan negara dalam beberapa sektor, baik politik, pendidikan, teknologi-sains, budaya, dan religi. Fenomena

multidimensi tersebut mengundang perhatian masyarakat kelas menengah untuk melakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi dan advokasi sosial.

Disinilah titik central pemetaan hadirnya kepedulian sosial yang mengundang banyak masyarakat sipil (*civil society*) dan komunitas sosial untuk memainkan peran konsolidasi politik humanis (kemanusiaan) saat kapasitas negara rendah. Maka penuturan Mahmudya (2017) tindakan menyikapi krisis tersebut menggerakkan hati beberapa tokoh yaitu Bagus Suryama Majana Sastra (Kader PKS), Sahabudin, Agung Notowiguno, dan Dedi Sularso melakukan aksi sosial ke seluruh Indonesia, dan setelah itu menggas komunitas untuk kepedulian sosial (filantropi) yang diharapkan bergerak secara sistematis dan terorganisir melalui visi kemanusiaan dengan nama PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat).

Menurut sejarah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) lahir pada 10 Desember 1999 sebagai salah satu lembaga kemanusiaan nasional yang berbadan hukum yayasan dengan akta notaris nomor 8 pada 9 April 2007. Seiring dengan kinerja yang terus berkembang pada 8 Oktober 2001, PKPU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama nomor 441. Dalam hal ini sebagai bukti kepercayaan masyarakat semakin luas sehingga pada tanggal 22 Juli 2008, PKPU memberikan sebuah prestasi baik yaitu terdaftar di PBB sebagai *Non Government Organization (NGO)* dengan "*Special Consultative Status With the Economic Social Council.*"

Arah PKPU sebagai lembaga kemanusiaan (Filantropi) kehadirannya di Indonesia mulai terlihat jelas sangat progresif dalam negara demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan PKPU dapat berdampingan dengan NGO internasional dari beberapa negara dalam rangka konsolidasi merespon masalah

kebencanaan, kemiskinan serta pembangunan kembali paska bencana yang menimpa Indonesia khususnya (Mahmudya, 2017). Menurut Bamualim dan Najib (2005) kiprah dan kontribusi penanganan PKPU sangat cepat yaitu penyelamatan kemanusiaan daerah konflik (Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, Papua dan lainnya), bencana alam (Sumatra Barat, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Papua, Aceh), dan daerah kritis dan minus (Gunung Kidul dan lereng merapi). Selain itu terbaru ketika bencana alam gempa, tsunami dan banjir (Lombok, Palu, Jakarta) dan beberapa daerah lainnya yang terkena bencana.

Selain beragam lembaga filantropi yang dirintis oleh masyarakat sipil seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZISNU), Dompot Dhua'afa (DD) Republika, Rumah Zakat, dan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Negara juga mempunyai lembaga khusus yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga filantropi nasional. BAZNAS adalah satu-satunya institusi resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI nomor 8 tahun 2001, dimana mengemban tugas dan fungsi untuk menghimpun zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada level Nasional (<http://baznas.go.id>). Tidak kalah pentingnya sebagai lembaga filantropi BAZNAS memiliki tanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat dengan asas dan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas kinerja.

Hadirnya praktik gerakan kemanusiaan (*Humanitarian*) ini pada dasarnya memang mengadopsi model gerakan filantropi Islam, hal ini juga tidak lepas dari dinamika sosial politik dan ideologi yang berkembang di kalangan kaum Muslim

(Latief, 2013:177). Dalam perspektif Islam filantropi diartikan program kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat salah satunya melalui kegiatan memberi atau beramal (Latief: 2017:16). Menurut pandangan Mike W. Martin dalam bukunya *Virtuous Giving* yang dikutip oleh Amelia Fauzia mendefinisikan filantropi secara umum yaitu semua pemberian baik itu benda maupun layanan yang diberikan oleh seseorang ataupun masyarakat dengan keadaan sukarela untuk kepentingan umum.

Model filantropi yang berkelanjutan (*sustainable*) selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang akan berdinamika dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Menurut Hilman Latief dewasa ini Indonesia diperlihatkan dengan perkembangan menarik terkait keterlibatan aktor politik dalam kegiatan filantropi Indonesia contohnya salah satu tokoh pendiri PKPU Suryama Majana Sastra merupakan sosok politisi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fenomena inilah menurut salah seorang pengamat Jepang *Kikue Hamayotsu* diberi nama “koalisi strategis” yaitu cara melakukan depolitisasi kegiatan sosial partai (Latief, 2013:190).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu organisasi politik dengan ideologi Islam (*religi*) yang sebelumnya berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (PK). PKS sebagai salah satu partai di Indonesia yang sangat intensif dalam merespon berbagai persoalan kemanusiaan seperti masalah korban bencana alam, korban konflik, dan kemiskinan. Beberapa media memberitakan PKS memberikan bantuan logistik pada saat bencana gempa bumi Lombok tahun 2018, dan gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Salah satu media yang menjadi sorotan adalah Republika karena menjadi bagian dari pendirian Dompet

Dhuafa dalam hal ini diprediksi menjadi sayap PKS. Pada dasarnya tidak hanya partai yang berideologi Islam, melainkan partai dengan ideologi nasionalis dan sekuler juga mulai banyak memiliki kegiatan filantropi walaupun aktivitas dan sikapnya insidental, tidak sistematis dan kurang profesional.

Adapun kegiatan filantropi partai politik (*parpol*) memiliki berbagai macam skema kegiatan untuk merespon masalah kesejahteraan contohnya Partai Golkar mempunyai program GOJO (Relawan Golkar Jokowi) yang aktif memberikan filantropi pendidikan berupa buku dan GOZIS (Gerakan Orang untuk Zakat, Infaq dan Sedekah) sebagai upaya mengimbangi maraknya kegiatan filantropi Islam di Indonesia. Selain itu PDIP memiliki BAMUSI (Baitul Muslimin) yang digunakan sebagai sarana dakwah pembinaan agama Islam (Latief, 2013:197). Potret tersebut dalam hal ini secara tidak langsung telah terjadi transformasi kontestasi kesejahteraan.

Selain filantropi *parpol* sebenarnya negara (*state*) sudah membuat beberapa program advokasi kesejahteraan seperti JPS (Jaringan Pengaman Sosial), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), serta terbaru yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, kemampuan agenda program filantropi negara tersebut tidak berjalan berkelanjutan (*sustainable*) dan selalu menimbulkan perspektif negatif dari beberapa pihak. Akibatnya, hal ini memicu perdebatan publik yang selalu dinarasikan menjadi isu politik kesejahteraan, mereka menjustifikasi pemerintah

khususnya eksekutif (bupati/ walikota/ gubernur maupun presiden) gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya politik kesejahteraan merupakan suatu alat dalam pertarungan proses elektoral yang menjadi modal dan model kampanye di Indonesia. Hadirnya kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi pembukaan UUD 1945 alenia ke empat. Politik kesejahteraan ini pada dasarnya juga berorientasi membentuk kepercayaan publik disudutkan dengan isu kemanusiaan yang urgent untuk mendapat perhatian dan penanganan cepat, tepat pada sasaran, salah satunya melalui gerakan lembaga filantropi yang fokus pada program kemanusiaan.

Kesejahteraan merupakan isu global (*global issue*) yang menarik untuk dimasukkan dalam parhelatan politik karena nantinya akan muncul inovasi program yang populis. Politik merupakan gelanggang dalam pertarungan kekuasaan untuk menduduki posisi strategis dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini partai politik sebagai subyek utama yang bermain untuk berdinamika sosial. Gerakan fundamental parpol harus bekerja eksis dalam menjaga citra agar tetap dikenal masyarakat luas salah satunya melalui *charity* atau aktivitas sosial (Latief, 2013). Kerja sosial tersebut dilakukan masif oleh lembaga filantropi nasional yaitu PKPU, meskipun secara historis merupakan lembaga filantropi satu-satunya di Indonesia yang lahir dari inisiasi kader parpol yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal menarik 10 tahun terakhir yaitu adanya kontestasi penyelenggara kesejahteraan (*political goods*) yaitu antara masyarakat sipil dengan negara, masyarakat sipil dengan masyarakat sipil, masyarakat sipil dengan partai politik,

partai politik dengan negara, partai politik dengan partai politik, masyarakat sipil dengan korporasi, negara dengan korporasi maupun masyarakat sipil dengan media. Hal ini mengilustrasikan banyak aktor yang terlibat dalam mengelola urusan filantropi dengan segala dampak positif dan efek negatifnya, terlebih hadirnya kepentingan politik dari proses penyedia kesejahteraan. Dalam hal ini juga muncul wacana politisasi kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh partai politik yang berafiliasi dengan lembaga filantropi baik lokal maupun nasional.

Maka, berdasarkan data dan permasalahan yang hadir di era kontemporer penulis ingin mengetahui secara komprehensif terkait kontestasi kesejahteraan berbasis filantropi di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengetahui kajian bagaimana kontestasi berjalan dan juga bagaimana pergeseran asimetris penyedia (aktor) kesejahteraan antara negara, masyarakat sipil dan partai politik berbasis filantropi. Kontribusi dalam penelitian ini adalah praktik-praktik kesejahteraan dianalisis dalam perspektif ilmu sosial dan ilmu politik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya hanya menjelaskan pada tataran filantropi Islam yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan modal usaha.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana politik kesejahteraan berbasis filantropi di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

### **1.3 Tujuan**

Adapun maksud dalam tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik kesejahteraan berbasis filantropi di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Untuk menganalisa bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh PKPU di dalam mengkonsolidasikan kekuatan politik.
3. Untuk mengetahui bagaimana demokratisasi mempengaruhi peran masyarakat sipil di dalam menyediakan kesejahteraan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat secara teoritis**

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami beragam aktor di dalam penyelenggaraan kesejahteraan yang berbasis filantropi.
2. Penelitian ini bermanfaat menjadi referensi dalam kajian kebijakan publik.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan filantropi yang di analisis dalam persepektif Ilmu Politik dan Pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat secara praktis**

1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan gambaran secara umum maupun secara khusus bahwa praktik gerakan politik kesejahteraan dalam lembaga filantropi dapat memberikan pengaruh



dalam sistem demokrasi di Indonesia yaitu relasi antara negara, masyarakat sipil, dan partai politik.

2. Bagi akademisi penelitian ini digunakan sebagai pendorong peningkatan kualitas akademik dalam melakukan studi lapangan melihat fenomena praktik kontestasi kesejahteraan.
3. Bagi pemerintah atau negara sebagai acuan dalam upaya mengembangkan kebijakan pembangunan kesejahteraan yang membuka kesempatan pada kerja-kerja kolaboratif dengan aktor-aktor non aktor negara.

### **1.5 Literatur Review**

Hasil riset Bamualim dan Najib tahun 2005 menjelaskan kelahiran Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) kinerjanya sangat cepat, cermat, dan efektif yang dibuktikan dengan gerakan aksi dan pelayanan yang diperlihatkan di wilayah konflik maupun bencana alam. Selain itu filantropi mampu menerapkan prinsip organisasi dan manajemen modern dalam mengelola program dan aktivitasnya. Sementara hasil riset dari Indonesia Zakat dan *Development Report* 2009 menjelaskan program pendayagunaan zakat yang diluncurkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) banyak bertransformasi dari ranah amal sampai sosial ke ranah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dalam hal ini terbuka peluang besar untuk mengkordinasikan zakat dengan program pengentasan kemiskinan.

Berbeda dengan riset terbaru yang dilakukan Yunus, Mawardi, dan Yoesoef (2018) mengungkapkan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh

sejak 2004-2016 membawa perubahan kehidupan sosial masyarakat baik fakir/miskin, anak yatim dan kaum dhuafa. Selain itu PKPU intensif dalam mengelola program kemanusiaan yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, anak yatim dan tanggap bencana. Fesalia Rumasya (2018) menjelaskan upaya PKPU memberdayakan wanita di Kelurahan Keteguhan sangat produktif yang ditandai dengan peningkatan kegiatan dari asosiasi menjadi UKM Sinar Mulya melalui klaster budaya yang membantu proses manajemen UKM.

Disambung dengan riset temuan Rachmat Hidayat (2017) menjelaskan LAZ PKPU Makassar berupaya menjalankan program zakat produktif dengan cara manajemen: Perencanaan program dengan membuat *assesment* untuk kebutuhan mustahik dan dilanjutkan program kerja yang pelaksanaannya dengan menggunakan modal bergulir. Selanjutnya hasil riset dari Mahmudya, dan Yuniar (2017) menjelaskan PKPU dalam memberdayakan masyarakat memiliki program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) berupa pinjaman modal selama 10 bulan. Hasil temuan Alimul Hadi (2014) menjelaskan adanya kegiatan program bantuan modal usaha kurang mencukupi kebutuhan, akan tetapi advokasi berjalan sesuai proses standard PKPU serta berperan dalam peningkatan keadan ekonomi dan sosial anggotanya.

Selain terkait pembahasan PKPU hasil riset Abdul Aziz (2015) mengungkapkan proses manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan melalui dua cara yaitu penghimpunan zakat dan pendayagunaan zakat. Menghimpun yaitu melakukan marketing (promosi) berjenjang dengan cara menawarkan program kegiatan yang dapat menarik kepercayaan muzaki. Pendayagunaan

merupakan proses hasil penghimpunan zakat dari muzakki untuk disalurkan kepada mustahik. Sementara menurut Zaenal Abidin (2016) menjelaskan program Sinergi, Keberlanjutan, dan Ketuntasan (SINJUTAS) meletakkan sisi filantropi dalam pemahaman kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mengkonsentrasikan potensi kekuatan antara lembaga filantropi dan perusahaan.

Berbeda dengan hasil temuan Aulia Rachman (2016) yaitu pertama pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis zakat produktif oleh LAZISMU sangat berperan dalam membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, kedua adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, dan peningkatan *skill*. Adapun hasil temuan Asep Saepudin Jahar tahun 2017 menjelaskan filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh ormas Islam dimana perkembangan filantropi di masing-masing ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dan karakteristik ormas masing-masing.

Selanjutnya Okta Nurul Hidayati pada tahun 2017 dengan judul filantropi dakwah dan kaum minoritas di Indonesia menjelaskan adanya praktik penyaluran dana filantropi memiliki banyak manfaat tidak hanya secara ekonomi melainkan dari aspek sosial, dan spiritual. Pertama filantropi membantu kesenjangan ekonomi dengan menggunakan modal usaha, kedua filantropi menciptakan keadilan, ketiga bantuan yang diberikan membantu untuk deredikalisasi. Sedangkan temuan Waskito Wibowo pada tahun 2018 dengan judul Filantropi berbasis Masjid untuk Keluarga Narapidana Terorisme (Napiter) penelitian ini menunjukkan kebanyakan filantropi berbasis masjid

hanya berperan sebagai santunan atau *charity* tanpa melakukan pendampingan keluarga napiter.

Berdasarkan *review* di atas menjelaskan tentang praktik beberapa lembaga filantropi Islam Indonesia yang menekankan pada aspek ekonomi, manajemen, bentuk kegiatan dan transparansi yang didistribusikan untuk kesejahteraan melalui praktik zakat produktif. Sementara penelitian ini akan lebih fokus melihat fenomena politik kesejahteraan yang dilakukan oleh lembaga filantropi nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sebagai satu-satunya lembaga filantropi yang lahir atas inisiatif kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejatinya kedua lembaga ini saling bersinergi meskipun hanya melalui cara kultural.

## **1.6 Kerangka Teori**

Landasan teori akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis (Wirartha, 2006: 23). Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep teori seperti pembangunan kesejahteraan, politik kesejahteraan (*Political good*), masyarakat sipil (*Civil Islam*), demokrasi sosial, demokrasi politik dan filantropi (*philanthropy*). Teori yang dipilih akan membantu fenomena yang diteliti oleh penulis. Berikut akan dijelaskan beberapa kerangka teori yang dapat menjadi dasar analisis penelitian:

### **1.6.1 Pembangunan Kesejahteraan**

Pembangunan merupakan suatu proses menuju kesejahteraan. Hal ini senada dengan pandangan hasil riset Indonesia Zakat dan

*Development Report 2009* menjelaskan pembangunan sebagai proses transformasi masyarakat yang melibatkan perpindahan cara berfikir tradisional ke cara modern, dalam hal ini diyakini pembangunan dikatakan berhasil jika proses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang ditandai dengan kualitas kesehatan yang baik, tingkat pendidikan tinggi, turunnya angka kemiskinan, dan tercapainya keseimbangan dan harmoni sosial. Namun, realitas sosial yang terjadi di Indonesia khususnya dalam proses pembangunan kesejahteraan banyak aspek yang mempengaruhinya salah satunya faktor politik dan ekonomi yang berimplikasi pada politik kesejahteraan.

### **1.6.2 Politik Kesejahteraan**

Konsep negara demokrasi selalu berhubungan erat dengan menjunjung tinggi makna kesejahteraan (Savirani dan Tornquist: 2015). Negara bukanlah aktor tunggal yang menyediakan kesejahteraan, melainkan ada aktor lain diluar negara yaitu komunitas, pasar, dan lembaga masyarakat sipil (misalnya PKPU) memiliki peranan vital dalam penyediaan kesejahteraan masyarakat (Mas'udi dan Lay, 2018: 280). Mas'udi dan Lay juga menegaskan hal ini terjadi kontestasi kesejahteraan antara kekuatan negara dan non negara. Adapun bentuknya hadir dengan negara kesejahteraan (*state based welfare*) ataupun kesejahteraan yang berbasis masyarakat (*societal based welfare*).Table

#### 1.1 Ruang Solidaritas:

Ruang Solidaritas	Karakter Utama
Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hierarki dan Otoritas</li> <li>• Hukuman dan kontrol</li> <li>• Birokrasi sebagai penyelenggara Utama</li> <li>• Prinsip Universal (warga Negara)</li> </ul>
Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertukaran Sukarela</li> <li>• Jejaring (saling ketergantungan)</li> <li>• Intensif dan disensitif dari pasar</li> <li>• Privat dan bisnis sebagai penyelenggara utama</li> <li>• Individu sebagai klien, bukan warga negara</li> </ul>
Komunitas	<p>Berbasis kultural/identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedekatan</li> <li>• Sukarela</li> <li>• Sanksi sosial</li> <li>• Komunitas atau organisasi sosial (berbasis agama dan adat)</li> </ul> <p>Individu sebagai anggota komunitas</p> <p>Kemanusiaan :</p> <p>kemanusiaan, sukarela, dan lintas batas negara</p> <p>komunitas dan organisasi nasional atau transnasional sebagai penyelenggara utama</p> <p>Individu dalam kondisi yang rentan</p>

Sumber: (Mas' dui, Lay, dan Hanif, 2018: 6)

Gambaran Mas' dui, Lay, dan Hanif (2018:6) menjelaskan bahwa negara sebagai batas utama solidaritas sosial, warga negara berhak mendapatkan manfaat solidaritas yang diatur negara. Sementara pasar menekankan pertukaran secara sukarela antara penyedia dan pelanggan sebagai cara orang-orang memenuhi kebutuhan mereka (Baekkeskov, 2007:542). Sedangkan ruang solidaritas sosial ketiga yaitu komunitas kesejahteraan yang berbasis agama, adat, kekerabatan atau ikatan identitas lainnya yang dapat bekerja secara formal dan informal berprinsip pada kesukarelaan dan cenderung nirlaba (*non profit*) (Mas' dui, Lay, dan Hanif, 2018:6). Dalam konsep nirlaba tersebut yaitu lembaga filantropi berbasis Islam yang menunjukkan aksi-aksi kemanusiaan baik lokal (*regional*), nasional maupun internasional. Kesejahteraan tidak serta merta dari sebuah negara, artinya akan ada salah satu lokus solidaritas atau kombinasi antar lokus (Mas' dui, Lay, dan Hanif, 2018:6). Proses pembangunan kesejahteraan dipengaruhi produk kebijakan yang dipengaruhi oleh intervensi rezim penguasa. Kesejahteraan merupakan bagian integral dari ideologi pembangunan (Robinson dan Hadiz, 2004) dalam (Tapiheru dan Mas' udi, 2018). Pembangunan yang berhasil disaat mampu mensinergikan antara kepentingan politik dengan pertarungan ideologi partai dan kepentingan umum untuk tujuan kemaslahatan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Menurut Savirani dan Tornquist (2015) dalam karyanya menjelaskan ada 3 temuan penting dalam konsep *Power, Welfare, dan*

*Democracy (PWD)* yaitu *pertama* rezim kesejahteraan Indonesia tidaklah tunggal melainkan pluralistik dibentuk oleh kekuatan lokal, *kedua* negara tidak berperan dominan untuk pemenuhan kesejahteraan di daerah, *ketiga* tuntutan untuk pembangunan kesejahteraan banyak berkaitan dengan kerentanan lokal akibat negara gagal dalam memenuhi kesejahteraan. Dalam hal ini dibutuhkan pengembangan sistem kesejahteraan yang diletakkan pada pembangunan ekonomi (Robinson, 2009). Artinya hal ini membutuhkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable*) yang dapat membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

### **1.6.3 Masyarakat Sipil (Cso)**

Profesor Robert W. Hefner (2000) dalam karya *civil Islam: Muslims and Democration In Indonesia* mendefinisikan salah satu aspek penting dalam institusi demokrasi adalah masyarakat sipil. Esensi demokrasi dapat bekerja sehingga warga negara harus belajar berpartisipasi dalam asosiasi sukarela lokal (Hefner, 2000:51). Asosiasi perantara merupakan bagian vital dalam demokrasi yang sehat (Tosqueville, 1969:192). Hefner menegaskan Keberhasilan kemampuan Amerika membangun institusi demokrasi berbeda dengan ketidakmampuan Prancis dalam hal yang sama. Hal ini ditandai karena di Amerika kebiasaan warganya terlibat dalam organisasi independen dari negara (Hefner, 2000:51).

Sementara menurut Fauzia (2013) *Civil Society* adalah sekumpulan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas secara berkelompok dalam suatu forum perkumpulan yang berada diluar negara, dan independen



negara (*vis a vis*). *Civil Society* (CSo) hadir sebagai kekuatan penyeimbang di tengah kekuasaan dalam sistem negara demokratis. Kekuatan *Civil Society* menjadi wacana yang diasumsikan banyak ahli bahwa CSo hanya bisa tumbuh dan berkembang di negara Eropa dan beberapa negara maju (Fauzia, 2013). Hal senada juga dikatakan oleh tokoh antropolog *Cum-filsuf* Ernest Gellner tidak ada *Civil Society* dalam masyarakat muslim. Mereka tidak melihat betapa pesatnya perkembangan *Civil Society* dikalangan masyarakat muslim khususnya Indonesia memberikan banyak peran dalam kegiatan filantropi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekuatan peran masyarakat sipil khususnya lembaga filantropi mampu memberikan jawaban pada masa orde baru sampai pasca orde baru terus masif membantu negara dalam mengisi ruang kosong khususnya dalam distribusi kesejahteraan. Lembaga filantropi berbasis komunitas mampu melahirkan budaya berderma (*charity*) yang saat ini sudah terorganisir dengan manajemen yang baik menjadi lembaga filantropi.

Maka saat ini dapat dipahami bahwa kemandirian masyarakat sipil berhadapan dengan negara selalu menjadi titik penyeimbang (*intermediary*) sistem demokrasi yang sedang berjalan. Ketika negara lemah maka masyarakat sipil (*Civil Society*) tetap menjadi garda terdepan pertahanan, namun ketika negara kuat maka masyarakat sipil lemah dan tetap mencari ruang kosong dalam membantu menekan kekuasaan dengan advokasi kesejahteraan. Beberapa masyarakat sipil yang mencari ruang kosong tersebut yaitu kelompok sosial yang tergabung dalam

lembaga filantropi nasional berupaya eksis dengan sistem manajemen marketing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meskipun sudah menjadi tugas dan fungsi negara. Kekuatan sektor ketiga menjadi bukti bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia selalu memberikan ruang kebebasan untuk turut membantu dalam perubahan sosial.

#### **1.6.4 Demokrasi Sosial**

Demokrasi merupakan suatu sistem dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi di Indonesia sangat banyak jenisnya seperti demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi agama, demokrasi kebudayaan dan demokrasi sosial yang jarang menjadi perhatian publik. Demokrasi sosial merupakan demokrasi yang berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Indonesia memiliki dasar tanggung jawab tentang kesejahteraan sosial yang sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat “(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa jaminan pelayanan kesejahteraan dilakukan oleh negara untuk masyarakat khususnya dalam menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sudah seharusnya demokrasi sosial

menjadi navigasi pembangunan kesejahteraan nasional sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kuntowijoyo (2018:153) menjelaskan bahwa subyek demokrasi sosial yaitu masyarakat dan negara. Masyarakat melakukan dua hal yang bisa dikerjakan ialah penyadaran dan pemberdayaan (*empowerment*), sedangkan negara melakukan legislasi dan intitusionalisasi. Dia juga menegaskan legislasi dan institusionalisasi diperlukan supaya ada kepastian hukum dan tersedianya intitusi khusus yang fokus pada urusan demokrasi sosial yaitu untuk pemberantasan kemiskinan, melalui program pembangunan dan pelayanan sosial. Bukti kelahiran lembaga filantropi berbasis negara maupun masyarakat sipil merupakan suatu hal pasti yang sudah ditunggu oleh masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui lahirnya lembaga PKPU yang berbasis Islampun, sangat disambut baik oleh kalangan masyarakat yang ingin menyalurkan zakat/donasinya kepada penerima manfaat (*mustahik*). Kiprah aktivitas keseharian PKPU secara tidak langsung sudah menerapkan konsep demokrasi sosial dimana awalnya hanya sebuah kelompok komunitas yang berhasil dibentuk oleh kader PKS sejak tahun 1999, saat ini menjadi sebuah lembaga filantropi nasional berstandar internasional di bawah PBB. Dalam menjalankan program PKPU menggunakan metode pemberdayaan (*advocacy*) dan santunan (*Charity*), hal ini menandakan bahwa PKPU membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat

dalam mendukung kesuksesan program kerja melalui sistem demokrasi sosial yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **1.6.4.1 Demokrasi Politik**

Demokrasi politik secara tidak langsung lanjutan dari praktik demokrasi sosial yang berhasil melakukan proses pembangunan kesejahteraan baik pelayanan maupun pembangunan infrastruktur, sedangkan dalam keberhasilan tersebut tentu melibatkan banyak aktor atau aktivitas ini banyak dipengaruhi oleh politik praktis yang dijalankan oleh beberapa kalangan elit, seperti birokrat, militer, politisi, dan pembisnis (investor). Kuntowijoyo (2018:132) menjelaskan kondisi politik internal dan eksternal sangat mempengaruhi peranan strategis umat dalam pembentukan institusi politik yang lebih demokratis, *pertama* dipengaruhi oleh kondisi internal umat. Sementara, *kedua* dari sisi eksternal sangat bergantung dengan bagaimana institusi politik mengakomodasikan kepentingan politik umat. Hal ini berkorelasi bahwa agama Islam memiliki kekuatan dalam mendukung proses demokrasi politik melalui partisipasi umat Islam. Selain itu Kuntowijoyo juga menegaskan demokrasi politik akan selalu membicarakan perangkat kenegaraan (birokrasi, pemimpin), transformasi politik (dinamika pengalaman bangsa), mekanisme politik (konflik dan integrasi, partisipasi, kontrol dan peranan partai), dan tatanan baru (elite, dan massa). Maka, dalam hal ini akan lebih fokus melihat bagaimana mekanisme politik terkait dengan peranan partai politik berbasis Islam

(*religi*) yaitu salah satunya PKS yang saat ini dikenal menjadi partai Islam *pragmatis*. Namun, motto kepedulian dalam tubuh partai tersebut berhasil dijiwai oleh kadernya sehingga dapat melahirkan lembaga filantropi nasional yang secara praktiknya sudah melewati beberapa fase dalam berhubungan dengan sistem birokrasi khususnya dinas sosial dan kepala pemerintah daerah sebagai pemimpin wilayah regional yang menjadi obyek sasaran pemberdayaan program.

### **1.6.5 Filantropi**

Seorang pengamat filantropi Hilman Latief (2013:6) mendefinisikan filantropi (kedermawanan) merupakan salah satu bentuk ekspresi kesalehan sosial, ekonomi dan politik dengan gerakan teorganisir. Sementara menurut pandangan Amalia Fauzia (2013:17) mendefinisikan filantropi sebagai aktivitas kegiatan pemberian (*given*) secara sukarela mulai dari seorang individu (*person*) dan masyarakat yang memberikan baik berupa benda maupun pelayanan yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Selain itu senada pada konsep Mike W. Martin dalam bukunya *Virtuous Giving* dalam Fauzia (2006:17) menguraikan ada empat unsur filantropi yaitu kedermawanan (*charity*), personal (non-negara), adanya pemberian (*given*), pelayanan (*service*), dan kerja sosial serta kepentingan umum masyarakat. Maka untuk mengetahui secara lebih mendalam ada beberapa jenis filantropi menurut Bamualim dan Bakar

(2005) dibedakan sebagaimana tabel berikut: Table 2.1 perbedaan filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial:

<b>Aspek pembanding</b>	<b>Filantropi Tradisional</b>	<b>Filantropi Keadilan Sosial</b>
Dasar (Motif)	<i>Person</i> (Individual)	Publik, kelompok (kolektif)
Orientasi ( <i>orientation</i> )	Kebutuhan mendesak (urgensi)	Kebutuhan dalam jangka panjang ( <i>sustainable</i> )
<i>Shape</i> (Bentuk)	Layanan ( <i>service</i> ) sosial langsung	Dukungan ( <i>support</i> ) perubahan sosial
<i>Character</i> (Sifat)	Sikap berulang	Program kegiatan menuntaskan ketidakadilan struktur
Dampak	Mengatasi ketidakadilan	Mengatasi akar penyebab ketidakadilan sosial
Contoh Program	Menyediakan tempat tinggal yatim-piatu	Pendampingan ( <i>Advocacy</i> ) perundang-undangan, perubahan kebijakan publik

Sumber: Bamualim dan Abu Bakar (2005)

Bentuk aktivitas filantropi keadilan selalu berusaha fokus pada perubahan sosial hal inilah sesuai dengan pandangan Fauzia (2016) menjelaskan filantropi dalam bentuk sederhana yaitu gotong royong (kerja bakti), kerja sosial, berderma (*charity*), dan penggalangan dana (*fundraising*) sebagai upaya untuk keperluan dan kebutuhan kemanusiaan sampai keterlibatan intensif yang berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan filantropi tersebut dijalankan oleh masyarakat sipil (*civil society*), yaitu sekelompok masyarakat yang mandiri (independen) dari negara, berfungsi sebagai penjaga keseimbangan (*intermediary*) antara negara dan non negara. Berdasarkan pada kajian Fauzia praktik filantropi dapat dikelompokkan menjadi tiga kecenderungan yaitu praktik kegiatan filantropi Islam untuk keadilan sosial, relasi negara dan masyarakat sipil,

dan adanya praktik berderma berbasis kerelawanan serta motif atau dasar yang menyertainya. Adapun motif tersebut bisa dilakukan secara kolektif dan individu melalui sebuah lembaga. Selain itu lembaga filantropi memiliki peranan beragam mulai dari menawarkan bentuk program kedermawanan yang terbatas dampak sosialnya sampai bentuk nyata kegiatan yang menawarkan gagasan transformatif tentang keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat (Latief, 2013).

Karya Hilman Latief (2013:31) yang berjudul Politik Filantropi Islam di Indonesia menjelaskan pengorganisasian kelembagaan filantropi terbagi dalam tiga sektor yang berbeda yaitu negara (pemerintah), swasta dan organisasi sosial (nirlaba). Sementara tokoh ahli kegiatan filantropi seperti Salmon dan Kramer dalam Payton dan Moody (2008) dalam bukunya berjudul Memahami Makna Filantropi dan Misinya (*Understanding Philanthropy It's Meaning And Mission*) yang juga dikutip Diyana (2016) mencoba memaparkan peran filantropi sebagai berikut:

1. Peran layanan (*service*) ketika dalam sektor lain tidak bekerja memberikan.
2. Peran advokasi (*advocacy*) untuk era reformasi.
3. Peran budaya sebagai cara mengekspresikan nilai (*value*), adat tradisi, identitas, dan beberapa aspek lainnya.
4. Peran warga negara yaitu membangun dan mengembangkan gerakan komunitas untuk menghasilkan output modal sosial.

Adapun dimensi filantropi menurut Diyana (2016) kegiatan kedermawanan meliputi pemberian secara sukarela, layanan (*service*) sosial dan asosiasi (perkumpulan). Ketiga hal tersebut saling berkaitan dibawah payung gerakan filantropi yang memiliki makna dalam setiap prosesnya:

a. Pemberian (*Given*)

Memberi merupakan tindakan sukarela dalam memindahkan suatu barang yang dimiliki kepada orang lain. Proses pemberian barang merupakan hal yang umum untuk dilakukan, pemberian yang sering dilakukan yaitu berupa uang meskipun dalam jumlah kecil, makanan, dan pakaian (logistik).

b. Pelayanan (*service*)

Pelayanan merupakan sebuah aktivitas dalam memberikan perhatian kepada seseorang untuk menerima fasilitas. Adapun bentuk pelayanan sukarela menjadi seorang relawan merupakan bagian dari dorongan hati nurani manusia yang memiliki kepekaan sosial untuk turut terlibat dalam membantu orang lain. Pelayanan identik dengan bentuk aktivitas langsung yang diberikan kepada orang lain untuk merasakan bantuan dari tenaga fisik.

c. Asosiasi (*association*)

Asosiasi merupakan bentuk perkumpulan kelompok dalam berkonsolidasi melakukan sebuah gerakan sosial. Perkumpulan tersebut bisa dari kelompok organisasi/ komunitas sukarela yang akan memberikan



pengaruh dengan kekuatan besar membantu meringankan beban penderitaan masyarakat.

Maka berdasarkan teori pakar filantropi disimpulkan bahwa filantropi (*philanthropy*) merupakan sebuah kegiatan kedermawanan berbasis kemanusiaan dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil (lembaga filantropi) yang terorganisir dengan visi kesejahteraan sosial. Namun, aktivitas yang dijalankan memiliki kepentingan politik praktis dengan cara membangun citra dan afiliasi politik guna mendukung eksistensi lembaga.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Berdasarkan teori-teori dari para ahli yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya teori tersebut oleh penulis dibuat secara general sebagai berikut:

- a. Politik kesejahteraan merupakan upaya solidaritas sosial berbasis lembaga filantropi dalam melakukan distribusi kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh produk kebijakan dari intervensi rezim penguasa.
- b. Masyarakat sipil (*Civil Islam*) merupakan kelompok masyarakat independen yang memiliki tujuan khusus dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat baik tingkat lokal (regional), nasional maupun internasional dan menjadi aktor penyeimbang (*intermediary*) negara.
- c. Filantropi (*philanthropy*) merupakan sebuah kegiatan kedermawanan (*charity*) berbasis kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil (lembaga filantropi) secara terorganisir, sistematis, jangka panjang dengan visi kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat. Serta

bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pendampingan (*advocacy*) masyarakat untuk mandiri.

### **1.8 Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

**a. Politik Kesejahteraan**, indikatornya adalah :

1. Terdapat skema kegiatan distribusi pemberian barang kebutuhan pokok.
2. Adanya distribusi reguler pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Adanya subsidi pintar dan beasiswa pendidikan.
4. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Terdapat kegiatan respon cepat tanggap bencana.
6. Adanya penurunan jumlah keluarga miskin.

**b. Masyarakat Sipil (*Civil Islam*)** indikatornya adalah :

1. Adanya partisipasi publik (masyarakat)
2. Adanya praktik kerja kerelawanan.
3. Adanya kesadaran politik

**c. Filantropi**, indikatornya adalah :

1. Adanya peranan secara reguler pelayanan (*service*) sosial.
2. Adanya kegiatan pemberian (*Given*)
3. Adanya kerja efektif asosiasi (*Association*)
4. Adanya program pemberdayaan (*Advocacy and Empowerment*).

## **1.9 Metodologi Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Pengertian penelitian kualitatif merujuk pada pernyataan John W. Cresswell (2013:4) merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan informasi politik kesejahteraan berbasis filantropi yang terdapat pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan ingin mengetahui patronase politik dibalik praktik pelayanan distribusi kesejahteraan.

### **1.9.2 Jenis Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder:

#### **1. Data Primer**

Azwar (2014) menjelaskan definisi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dan hasil observasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Menyangkut masalah politik pembangunan kesejahteraan berbasis filantropi di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **2. Sekunder**

Menurut Azwar (2014) mendefinisikan data sekunder atau tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa arsip dokumen, buku cetak, website resmi lembaga, jurnal, peraturan resmi, dan beberapa artikel yang telah diidentifikasi kevalidannya untuk melengkapi data yang diperoleh melalui arsip lembaga PKPU pusat sampai cabang.

### **1.9.3 Lokasi Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian maka lokasi penelitian yang diambil yaitu Kantor Cabang Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Januari 2019.

### **1.9.4 Informan Penelitian**

Informan diharapkan dapat memberikan sumber data yang relevan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketua cabang PKPU DIY**

Penulis memilih ketua cabang karena sebagai kordinator wilayah dan yang menjadi penggerak organisasi, maka penulis menganggap ketua cabang mengetahui *role model* secara sistematis dan berkompeten menjadi informan penelitian.

#### **2. Karyawan PKPU DIY**

Penulis memilih beberapa karyawan atau pengurus karena ingin melihat sistem kerja dalam keseharian mereka bekerja secara teknis. Selain

itu ingin melihat bagaimana proses awal masuk dalam lembaga PKPU. Penulis ingin melihat jaringan kultural yang dimiliki PKPU dalam tataran akar rumput.

### 3. *Costumer* PKPU DIY

Penulis memilih masyarakat (*custumer*) karena sebagai masyarakat dapat memberikan alasan rasional mengapa memilih menyalurkan bantuan ataupun zakat dilembaga PKPU. Selain itu bisa melihat sikap ideologis masyarakat melihat kinerja PKPU di lapangan.

### 4. Komunitas Penerima manfaat (Desa Binaan)

Penulis memilih komunitas penerima karena hal ini diharapkan masyarakat atau komunitas binaan PKPU dapat menjelaskan program dan aktivitas apa saja yang selama ini dilakukan oleh lembaga PKPU dalam memberdayakan masyarakat sebagai *pilot project*, serta dapat mengetahui *feedback* apa yang diterima antara masyarakat dan PKPU.

### 5. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis memilih kader PKS karena ingin mengetahui respon dan pandangan kader partai terhadap aktivitas lembaga filantropi PKPU yang menurut historisnya aktivis pemuda kader PKS sebagai inisiator lahirnya yayasan PKPU.

## **1.9.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.9.5.1 Wawancara**

Pandangan John W. Creswell (2013) wawancara merupakan kegiatan *face to face Interview* (berhadapan langsung dengan informan). Wawancara bertujuan untuk mencari informasi yang

berkaitan dengan orang, kejadian, serta organisasi, sehingga didapatkan data penelitian dari kegiatan wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada informan yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam praktik filantropi di lembaga PKPU DIY.

#### **1.9.5.2 Observasi**

Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan manusia dalam kesehariannya menggunakan panca indera mata. Hal ini ditegaskan menurut profesor psikologi pendidikan John W.Creswell (2013) menjelaskan observasi merupakan penelitian langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Hal ini juga senada dengan Alwasilah (2000) observasi adalah pengamatan sistematis dan terencana diniati untuk memperoleh data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya. Dalam proses observasi penulis melihat dan mengamati secara langsung bagaimana praktik-praktik kerja sosial kemanusiaan dijalankan sampai berdiskusi dengan masyarakat di desa binaan PKPU.

#### **1.9.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambar secara visual, sementara menurut John W.Creswell (2013) merupakan proses mengumpulkan dokumen baik berupa dokumen publik (koran, makalah, dan laporan kantor). Dalam penelitian ini data diambil dari mendokumentasikan output realisasi program lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dengan beberapa

gambar dilapangan sebagai bukti otentik desa binaan yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota se-DIY.

#### **1.9.5.4 Teknik Analisis Data Penelitian**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara sebagai berikut:

- a. Kategorisasi (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan (Miles dan Huberman, 1992) dalam Agus Salim (2006).
- b. Interpretasi adalah memaknai data, selain itu juga bisa diartikan perbandingan hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori (Creswell, 2013: 284). Maka dalam hal ini penulis akan mengintepretasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk dianalisis secara mendalam.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*coclusion drawing and verification*) adalah tahapan akhir dalam mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan untuk menjamin validitas data (Miles dan Huberman, 1992) dalam Agus Salim (2006).